

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 yang mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu-kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah itu dapat dikoordinasikan, disinergikan serta diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini selaras berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan dari sebuah tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, sebagai pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkup lingkungan wilatyah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Kunci keberhasilan suatu perkembangan berada pada proses perencanaan pembangunan. Dimana pembuat rencana harus mampu untuk merumuskan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki sebuah pengetahuan dan wawasan yang luas dalam bidang pembangunan sebuah daerah berdasarkan segala potensi yang dimiliki oleh

suatu wilayah daerah (Buhaerah et al., 2017). Dalam sebuah penyelenggaraan desentralisasi pada suatu daerah salah satu urusan yang harus dilaksanakan bagi pemerintahan daerah ialah urusan mengenai perencanaan pembangunan, dimana harus memiliki fungsi yang penting dan bersifat strategis, dengan perencanaan ini dapat dilihat bagaimana suatu daerah tersebut akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki serta dikelola. Perencanaan yang baik ialah perencanaan yang dilakukan atas dasar data, informasi serta penyusunan yang akurat dan akuntabel (Fuady, 2012).

Menjadi bagian dari sebuah proses dalam perencanaan pembangunan ialah suatu proses dan langkah yang wajib dilakukan dan harus tetap berjalan sesuai tahapannya yang ditentukan oleh jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh dari hasil pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam konteks melakukan pembangunan, setiap pemerintah daerah tentunya harus memiliki perencanaan yang presisi dan dapat melakukan tindakan evaluasi terhadap pembangunan dan perencanaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari evaluasi kinerja suatu organisasi. Evaluasi kinerja organisasi menjadi langkah kunci penting untuk memastikan pencapaian sebuah tujuan dan komitmen kinerja dalam suatu proses perencanaan. Evaluasi ini tentunya tidak hanya mencakup kinerja organisasi secara keseluruhan, tetapi juga menyoroti kinerja pegawai sebagai elemen kunci dari mewujudkan visi dan misi organisasi dalam konteks manajemen kinerja di lingkungan tersebut.

Oleh karena itu, pengembangan daerah dapat dijalankan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang didasarkan dan

tergantung pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), termasuk yang mencakup Provinsi Jambi. Sebagai hasilnya, RPJMD yang terkait dengan RPJPD yang bertujuan pada pembangunan nasional ini akan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dan sejalan dengan fungsinya dalam perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Lembaga pemerintah ini akan membantu Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait perencanaan daerah dan mengevaluasi pelaksanaannya sesuai dengan program dan rencana Kepala Daerah yang memimpin.

Peranan yang dijalankan ini memiliki signifikan besar dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penyusunan mekanisme RPJMD Provinsi Jambi harus diselaraskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sebagai lembaga koordinator tunggal yang memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam membantu Kepala Daerah menetapkan kebijakan terkait perencanaan pembangunan. Dalam kerangka manajemen kinerja di Bappeda, evaluasi kinerja organisasi dan pegawai menjadi sebuah langkah kunci untuk memastikan efektivitas, efisiensi dan pencapaian tujuan strategis. Proses evaluasi tidak hanya mencakup penilaian secara kuantitatif, tetapi juga menekankan penilaian kualitas dari komitmen kinerja sebagai aspek penting dalam mewujudkan visi dan misi Evaluasi Kinerja Organisasi Bappeda.

Sebagai Provinsi yang sedang berkembang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2021, ketika Al-Haris terpilih sebagai Gubernur Jambi dan Abdullah Sani sebagai Wakil Gubernur Jambi, menjanjikan kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi. Kebijakan ini merupakan bagian arah pembangunan nasional, dengan mempertimbangkan keunggulan daerah serta kearifan lokal masyarakat Jambi. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 161/KEP.GUB/BAPPEDA /2.1/2024 Tentang Penetapan Proyek Strategis Provinsi Jambi Tahun 2024, untuk mendukung Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan mencapai target Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sepanjang periode 2021-2024. Salah satu upaya tersebut adalah melalui program unggulan yang dikenal dengan nama Dumisake, yang bertujuan mempercepat pengurangan ketimpangan pembangunan, meningkatkan dan menghidupkan kembali perekonomian masyarakat dan daerah, serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) diproyeksikan sebagai program prioritas utama oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Dumisake mencakup serangkaian program yang diimplementasikan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang sejalan dengan Visi-Misi Jambi MANTAP yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2021. Program-program tersebut berbentuk sebagai berikut :

1. Jambi Cerdas dan Pintar : Termasuk akses internet untuk semua desa/kelurahan, bantuan biaya pendidikan/beasiswa untuk siswa SMA, SMK, dan SLB dari keluarga miskin, beasiswa S1 dan S3 untuk umum dan Dosen, serta beasiswa untuk atlet berprestasi dan bantuan pendidikan anak usia dini
2. Jambi Sehat : Meliputi subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin yang belum ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Jambi Tangguh : Termasuk program bedah rumah, pengembangan sarana prasarana pedesaan dan perkotaan, bantuan modal kerja untuk UKMM/UMKM/Industri rumah tangga/ *Startup/Milinieal*, bantuan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin, serta bantuan bibit, operasional lembaga adat, dan peningkatan *life skill* santri/santriwati.
4. Jambi Agamis : Meliputi bantuan untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren, peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan pesantren, serta program satu desa satu Tahfidz Al-Qurán, termasuk pemberian honorarium kepada pegawai Syara''dan guru pengajian melalui bantuan keuangan ke Desa.
5. Jambi Responsif : Berfokus pada bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta memberikan tanggapan cepat terhadap aduan kemanusiaan dan reaksi terhadap bencana.

Program ini dikemas sesuai dengan RPJMD yang disusun oleh Bappeda Provinsi Jambi dalam memenuhi Visi-Misi Jambi MANTAP. Namun terdapat sebuah permasalahan yang timbul pada tahun 2022 dengan pernyataan bahwa program ini hanya sebatas semboyan, bukan diartikan sebagai bantuan uang Dua Miliar Satu Kecamatan. Dilansir dari *Jambiberita.com*, jubir fraksi PDI Perjuangan Syamsul Riduan menegaskan dalam konteks perencanaan maupun penganggaran mulai dari RPJMD, RKPD, RAPBD dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBD, fraksi PDI-P tidak menemukan konsep sebagaimana anggapan masyarakat maupun klaim tersebut. *“Fraksi PDI-P menilai DUMISAKE bukan akronim Dua Miliar Satu Kecamatan, tetapi tagline beberapa sub kegiatan yang terdistribusi melalui mekanisme belanja pada perangkat daerah yang dikemas sedemikian rupa ke dalam beberapa komponen program yakni Jambi Cerdas, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis dan Jambi Responsif”* (Jambiberita.com, 2022). Ini menggambarkan bahwasannya program Dumisake ini hanya sebuah perencanaan yang sebenarnya hanya rutin pemerintahan dalam membangun kesejahteraan masyarakat seperti sebelumnya.

Abun Yani, SH, seorang Tokoh Pemuda Muaro Jambi sekaligus anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra, memberikan tanggapan terhadap kritik terkait polemik program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Haris Sani, *“Abun Yani juga mengatakan Gubernur perlu mengevaluasi kinerja BAPPEDA dan Perangkat Daerah yang gagal menerjemahkan sekaligus mengimplementasikan program DUMISAKE sehingga belum terealisasi sampai APBD semester pertama TA 2022 lewat”* (Jambi.co, 2022), ini mencerminkan

bahwa program Dumisake terindikasi bermasalah baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan program. Karena bukan hanya programnya saja namun prosedur perencanaan dan pengimplementasian program Dumisake ini bermasalah, mengingat dipertanyakan evaluasi kinerja dari Bappeda dan perangkat daerah yang berwenang dan sebagai pelaksana program ini, karena keberlanjutan realisasi ini berhenti di tahun 2022 dan setelah itu lenyap hanya berita mengenai *tagline* bahwa program Dumisake ini masih dianggap keberadaannya. Dalam pelaksanaan program pun terdapat permasalahan yang mencerminkan bahwasannya kinerja OPD yang bertanggungjawab dan Badan yang menaungi program ini belum dilaksanakan secara optimal bahkan belum direalisasikan dan mengalami keterlambatan realisasi.

Berdasarkan hal tersebut, kinerja Bappeda Provinsi Jambi dan OPD yang mengelola Program Dumisake perlu dipertanyakan. Program ini dinilai belum berjalan optimal dan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. Masyarakat, anggota legislatif, serta pihak terkait mempertanyakan bagaimana cara agar program ini dapat dijalankan dengan lebih baik melalui evaluasi dan implementasi yang lebih efektif oleh badan dan OPD terkait.

Peneliti menemukan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini melalui penelusuran penelitian sebelumnya. Kajian ilmiah mengenai evaluasi kinerja pada institusi pemerintah telah banyak dilakukan. Penelitian ini merujuk pada beberapa literatur yang relevan dengan topik penelitian saya yang berjudul “Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam Program Dumisake”. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar penting

untuk memahami konteks evaluasi kinerja, sekaligus mempertegas fokus dan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mengkaji kinerja BAPPEDA Provinsi Jambi dalam program tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai prespektif evaluasi kinerja menunjukkan berbagai temuan penting dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan program. Penelitian terkait Laporan Kinerja (LAKIN) BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai pedoman Lembaga Administrasi Negara, dengan sebagian besar program terlaksana dengan baik meskipun terdapat kendala teknis. Hal ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengukuran berbasis hasil untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan (Lucyana et al., 2020). Sementara itu, evaluasi kinerja pembangunan di Kabupaten Grobogan menunjukkan adanya ketidakselarasan dokumen perencanaan seperti Renja SKPD dan Renstra SKPD, serta ketidaksesuaian antara RKPD dan APBD, yang mencerminkan perlunya pengendalian dan pemahaman yang lebih baik terkait keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (Siswanto, 2013). Selain itu, evaluasi kinerja Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban menunjukkan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat hingga rata-rata 16,16% dan penciptaan 625 lapangan kerja di sektor pertanian, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pencapaian tujuan jangka panjang seperti pengurangan kemiskinan secara menyeluruh dan penciptaan wirausaha baru (Kurniawan et al., 2014). Penelitian lain mengenai BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kaur menilai bahwa produktivitas dalam menyusun rencana kerja pembangunan yang efisien

telah dicapai melalui keterlibatan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemantauan anggaran untuk memastikan efektivitas alokasi dana yang dapat mendukung pengembangan di masa depan (Rahiman et al., 2023). Temuan-temuan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pentingnya evaluasi kinerja untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan dampak yang berkelanjutan dalam pembangunan.

Penelitian mengenai prospektif Program Dumisake di Provinsi Jambi memberikan wawasan penting terkait implementasi dan dampaknya dalam berbagai aspek pembangunan daerah. Program ini, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian berjudul “Peran Program Dumisake Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM dan Perekonomian Masyarakat Provinsi Jambi Masa Covid-19”, berhasil memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM selama pandemi. Bantuan modal dari pemerintah membantu UMKM mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, meskipun pandemi menyebabkan 82,9% UMKM mengalami penurunan omzet. Temuan ini menunjukkan bahwa Program Dumisake memainkan peran strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat lokal (Faradilla Herlin, Ovi Kusmaladwi, dan Rian Dani, 2024). Namun, penelitian lain yang berjudul “Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam Mempercepat Implementasi Program Dumisake Melalui Jambi Kartu Sehat” mengungkapkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program. Ketidakjelasan kebijakan, kurangnya informasi kepada pemangku kepentingan, serta minimnya dukungan pelaksanaan menjadi hambatan utama. Meskipun

program ini bertujuan memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui fasilitas yang cerdas dan responsif, implementasinya belum sepenuhnya optimal, karena masih ada masyarakat yang belum menerima manfaat program ini. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan program dan pelaksanaannya, yang membutuhkan perbaikan dalam strategi kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif (Yuniara Simanjorang, 2022).

Selanjutnya penelitian terdahulu ini menunjukkan berbagai prespektif analisis terkait kinerja dan perencanaan pembangunan daerah. Salah satu penelitian mengungkap bahwa kinerja BAPPEDA Kota Medan dalam pembangunan mengalami fluktuasi signifikan, dengan penurunan dalam dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Meskipun ada upaya pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia, hasilnya tetap bergantung pada partisipasi masyarakat, sedangkan realisasi anggaran dan pelaksanaan program perlu ditingkatkan untuk hasil yang lebih optimal (Fitri Yani Panggabean et al., 2023). Sementara itu, penelitian lain menemukan bahwa BAPPEDA Provinsi Jambi menghadapi tantangan dalam perencanaan dan penganggaran akibat ketidakonsistenan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RENSTRA, yang menghambat penghitungan anggaran dan pencapaian target. Penerapan sistem informasi manajemen anggaran dapat membantu memantau capaian kegiatan dan realisasi anggaran, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran (Febri Suherdiansyah dan Joni Devitra, 2020).

Penelitian saya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian sebelumnya berfokus pada peran, kajian evaluasi,

pelaksanaan dan strategi terkait program Dumisake dan evaluasi kinerja beberapa instansi. Dalam penelitian tersebut tidak membahas bagaimana Evaluasi Kinerja Bappeda Provinsi Jambi Dalam Program Dumisake. Dengan mempertimbangkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas yang dilakukan beberapa peneliti, peneliti tertarik untuk memberikan sebuah temuan baru dalam mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Dumisake yang berfokus pada bagaimana kinerja dari Bappeda Provinsi Jambi dalam perencanaan program Dumisake yang berdampak pada pertumbuhan pembangunan masyarakat Provinsi Jambi. Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada evaluasi kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan pembangunan masyarakat Provinsi Jambi, namun peneliti juga melihat sejauh mana evaluasi kinerja tersebut berdampak terhadap kebijakan program Dumisake. Dengan mengusulkan Judul **“Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi dalam Program Dumisake”**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan dijelaskan, penelitian ini merumuskan masalah dengan mengajukan pertanyaan Bagaimana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi sebagai *Leading Sector* dalam Program Dumisake.

1. 3 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi sebagai Leading sector dalam Program Dumisake.

1. 4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberiakan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan dan perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dan analisis yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang ada, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Kinerja Bappeda Provinsi Jambi, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan serta evaluasi dari Program Dumisake.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi dasar dan referensi bagi mahasiswa yang hendak mengadakan penelitian yang lebih lanjut dan bagi pembuat kebijakan penyelenggara dalam penyusunan Program Dumisake khususnya di Provinsi Jambi sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menerapkan bagaimana kinerja dari Bappeda Provinsi Jambi dalam Program Dumisake.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Evaluasi Kinerja

Proses pengendalian melibatkan perbandingan antara kinerja yang terjadi dengan target yang diinginkan, serta memberikan umpan balik yang diperlukan kepada manajemen untuk mengevaluasi pencapaian hasil. Menurut teori dari Peter F. Drucker yang menjadi tolak ukur evaluasi kinerja ketika karyawan mempunyai kewajiban menyusun konsep tujuan jangka pendek dan kemudian menelaahnya dengan manajer (P. F. Drucker, 2008).

Pengukuran kinerja pada intinya merupakan kegiatan upaya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan secara periodik bagaimana operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan pekerja berdasarkan sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya bergantung dan dioperasikan oleh sumber daya manusia, penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian terhadap bagaimana perilaku manusia dalam menjalankan peran mereka dalam sebuah organisasi. Dalam manajemen modern, pengukuran terhadap fakta-fakta akan menghasilkan data yang dapat dianalisis sehingga memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi para manajer dalam pengambilan keputusan.

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut juga dapat dijadikan *input* bagi perbaikan atau peningkatan kinerja

organisasi selanjutnya. Berikut merupakan beberapa dimensi dari teori Evaluasi Kinerja Organisasi menurut Peter F. Drucker :

1. Efektivitas, dimensi ini menyoroti sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas membantu organisasi untuk menilai apakah mereka berhasil mencapai hasil yang diinginkan
2. Efisiensi, drucker menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan organisasi. Dimensi ini berkaitan dengan seberapa baik organisasi menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan mereka. Evaluasi efisiensi membantu organisasi untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan penggunaan sumberdaya secara optimal.
3. Responsivitas, dimensi responsivitas menyoroti kemampuan organisasi dalam merespon perubahan lingkungan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Organisasi yang responsive mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya.
4. Akuntabilitas, Drucker turut menekankan pentingnya akuntabilitas dalam evaluasi kinerja organisasi. Dimensi ini mencakup sebuah pertanggungjawaban organisasi terhadap keputusan dan tindakan yang diambil serta transparansi dalam menjalankan aktivitasnya (P. F. Drucker, 2008).

Dengan memperhatikan dimensi-dimensi tersebut, organisasi dapat melakukan evaluasi kinerja yang menyeluruh dan mendalam untuk

meningkatkan efektivitas, efisiensi, responsivitas dan akuntabilitas mereka dalam mencapai tujuan dan merespons perubahan lingkungan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan teori yang telah dijabarkan diatas penelitian ini menggunakan teori yang dapat mengukur evaluasi kinerja Bappeda Provinsi Jambi dalam program dumisake dengan memperhatikan dimensi-dimensi yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja sebagai penentu operasional secara berkala pada Bappeda Provinsi Jambi, komponen Bappeda Provinsi Jambi ,dan tenaga kerja yang dievaluasi berdasarkan target, norma dan parameter yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebab Bappeda Provinsi Jambi pada prinsipnya dikelola oleh tenaga manusia, maka evaluasi kinerja sebenarnya adalah evaluasi terhadap tindakan manusia dalam menjalankan peran yang mereka emban dalam suatu organisasi, terutama dalam konteks program Dumisake.

1.5 2 Perencanaan Pembangunan

Sebuah pembangunan merupakan suatu proses menuju tercapainya tujuan negara banyaknya faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut membuat saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan sendiri tidak dapat berjalan begitu saja atau secara spontan, namun tetap melalui sebuah proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah sebagai peran yang paling banyak berkontribusi terutama dalam proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan tentunya berlangsung dalam kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun dengan proses yang panjang ini dapat mencapai tujuan pembangunan yang akan terus menerus berproses dalam suatu lingkaran yang tidak berkeputusan. Perencanaan sendiri merujuk kepada keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Dengan sebuah perencanaan yang ingin dirumuskan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif dapat memberikan sebuah hasil yang optimal. Perencanaan dibutuhkan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumberdaya yang tersedia, maka harus memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan. ‘

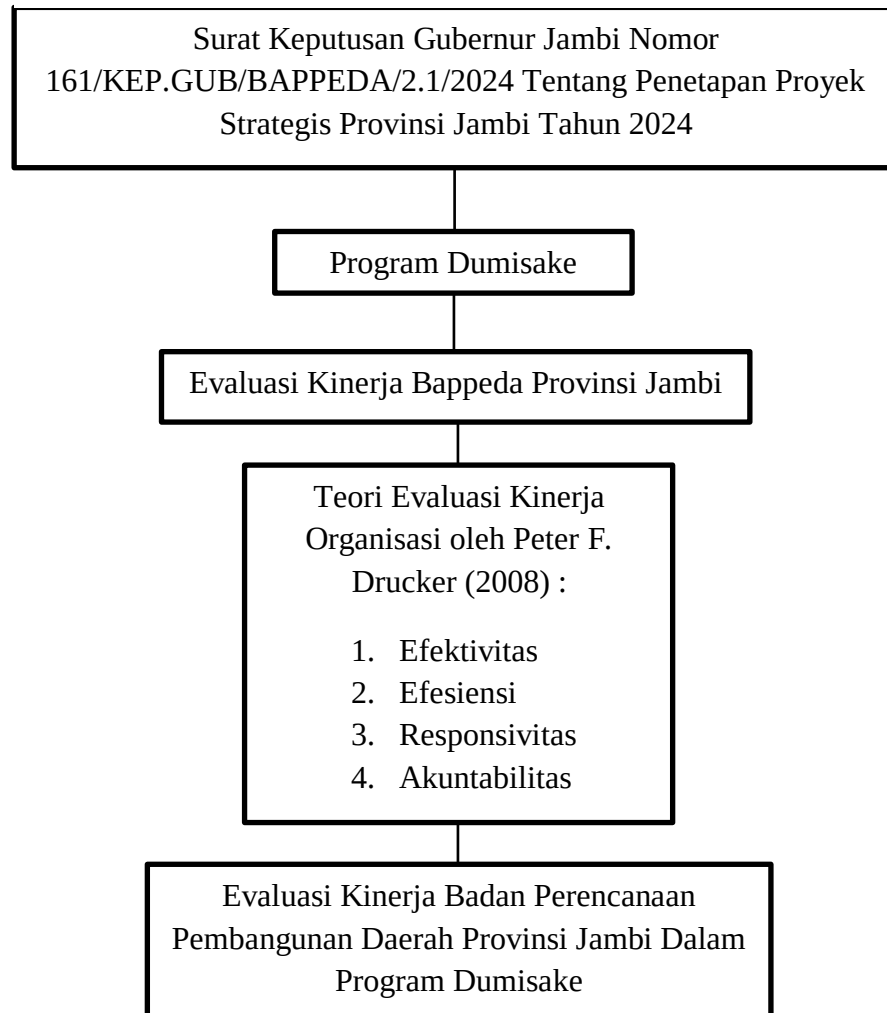
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang tidak mudah karena menghadapi berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Sehingga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, penting untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai. Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi manajemen yang saling berkaitan. Dalam praktiknya, monitoring sering diartikan sebagai pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung, sementara evaluasi diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang

telah dilaksanakan. Dalam perumusan perencanaan pembangunan bahwa kegagalan proses perencanaan diakibatkan oleh beberapa masalah khusus tertentu, yaitu :

- Keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya.
- Data-data yang tidak memadai dan tidak handal.
- Gejolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
- Kelemahan kelembagaan.
- Kurangnya kemauan politik (Todaro, 2000).

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1.6 Kerangka Berpikir



Sumber : Peneliti

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk memperoleh sebuah data yang diinginkan dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan-

temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau dengan pendekatan kuantifikasi. Penelitian kualitatif memungkinkan untuk memahami kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku manusia, fungsi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan (Drs. H.M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012).

Penelitian kualitatif ini dapat mengungkapkan gejala yang ada secara komprehensif dan sesuai konteks melalui pengumpulan data yang diambil dari objek alami, dengan peneliti sebagai instrument utama. Penelitian menggunakan metode kualitatif ini akan menyoroti kinerja Bappeda Provinsi Jambi dalam Program Dumisake, yang diharapkan akan menghasilkan temua-temuan yang sebelumnya tidak terungkap. Melalui pendekatan kualitatif, hasil dari kinerja Bappeda Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengelolaan Dumisake akan terlihat jelas.

1.7 2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diartikan sebagai lokasi atau area yang digunakan peneliti untuk melakukan proses pengumpulan data dan mendapatkan informasi mengenai data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada Program Dumisake yang merupakan kebijakan dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi untuk mendukung proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Visi-Misi Jambi MANTAP.

1.7 3 Fokus Penelitian

Proposal penelitian ini berfokus pada Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Dalam Program Dumisake.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang terjadi dalam kinerja Bappeda terkait program. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi sejauh mana kinerja Bappeda Provinsi Jambi dalam penyusunan perencanaan program Dumisake. Tujuan utamanya adalah untuk memahami masalah terjadi dalam perencanaan program Dumisake dan bagaimana evaluasi kinerja dari Bappeda Provinsi Jambi dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program tersebut.

1.7 4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan elemen yang amat krusial karena kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada sumber data tersebut. Dengan demikian, pemilihan metode pengumpulan data sangat dipengaruhi oleh sumber data yang tersedia. Sumber data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Purhantara, 2010) :

a. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, di mana peneliti menggunakan instrument yang telah ditetapkan untuk mengumpulkan informasi. Pengumpulan data primer adalah tahap internal dalam proses penelitian dan sering kali penting untuk pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena memberikan detail yang lebih mendalam (Purhantara, 2010). Dalam penelitian ini, informasi dari data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung kepada dinas terkait yang berwenang dalam penelitian ini, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jambi sebagai *leading sector* dalam Program Dumisake, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Kepala Biro Kesra sebagai pelaksana Jambi Cerdas dan Pintar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebagai pelaksana Jambi Sehat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dan Kepala Dinas PUPR sebagai pelaksana Jambi Tangguh, Kepala Biro Kesra sebagai pelaksana Jambi Agamis dan yang terakhir Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebagai pelaksana Jambi Responsif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dalam berbagai format. Data sekunder merupakan data yang sudah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, meskipun yang dikumpulkan adalah data asli (Moh. Pabundu Tika, 2006). Data sekunder dapat diakses melalui berbagai instansi, perpustakaan, atau pihak lain yang memiliki keterkaitan. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui kajian literatur, yang meliputi dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari RPJMD, RENJA, RKPD, Surat Keputusan Gubernur Nomor 161 dan melalui *website* yang relevan dengan data dari penelitian.

1.7 5 Teknik Penentuan Informan

Dalam teknik penentuan informan ini, sumber informasi merupakan individu yang mengetahui informasi terkait penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball* untuk

memilih informan, dimana informan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Sampling Purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria (Sujarweni, 2015). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi informan adalah pihak-pihak yang menangani langsung permasalahan evaluasi kinerja dan Program Dumisake, yaitu:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi
5. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi
6. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
7. Kepala Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Jambi.

1.7 6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan aspek penting dan esensial dalam penelitian untuk memahami suatu masalah atau fenomena, berfungsi sebagai metode untuk memperoleh informasi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai cara dan teknik tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar. Pengumpulan data adalah sebuah prosedur yang sistematis dan berstandar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan strategis pengumpulan data ini merupakan langkah menuju tujuan

penelitian yang terstruktur (Nazir, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Teknik wawancara melibatkan komunikasi verbal antara peneliti dan informan yang berkaitan dengan substansi penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data melalui percakapan dan interaksi tatap muka dengan individu yang memberikan informasi dan keterangan kepada peneliti.

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan sebuah penelitian dengan menggunakan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Nazir, 2014).

Tentunya dalam proses wawancara ini peneliti akan melakukan aktivitas rangkaian wawancara bersama instansi, staff dan bagian yang terlibat dan terkait dalam kinerja Bappeda dalam Program Dumisake.

b. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan karena dokumen merupakan sumber yang konsisten, kaya, dan memfasilitasi, serta dokumen memiliki keberadaan alami sesuai dengan situasi atau konteksnya (Moleong, 2014). Metode dokumentasi ini dipergunakan sebagai bukti dari kegiatan penelitian evaluasi kinerja Bappeda Provinsi Jambi berupa foto, dokumentasi, data dan yang relevan dengan penelitian ini.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji dan meneliti dengan menggunakan alat ukur yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diketahui (Djaali, 202 C.E.). Dalam keakuratan data yang terkumpul dan didapatkan sangat diperlukan, karena sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Menganalisis data membutuhkan perhatian dan focus yang cermat, serta usaha fisik dan mental yang signifikan. Selain analisis data, peneliti juga perlu mendalami literature untuk mengkonfirmasi teori.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data sedang berlangsung, serta setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data sudah mencapai titik kejenuhan. Miles dan Huberman mengusulkan pendekatan analisis yang berkelanjutan melalui model interaktif sebagai berikut (Miles, M.B, Huberman, A.M & Saldana, 2014) :

1. Reduksi Data

Yusuf (2014) menjelaskan bahwa reduksi data merujuk pada langkah-langkah seperti pemilihan, focus, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data mentah yang terdapat dalam catatan tertulis lapangan (*Written Up Field Notes*) (Yusuf, 2014). Oleh karena itu, proses reduksi data akan berlangsung selama pelaksanaan kegiatan penelitian. Karena volume data yang diperoleh dari kegiatan lapangan dapat cukup

besar, penting untuk mencatat dengan teliti dan detail. Dalam melakukan reduksi data, langkah-langkah akan dipandu oleh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses produksi data juga melibatkan pemikiran kritis yang memerlukan kecerdasan dan pemahaman yang mendalam.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya dalam penelitian adalah menyajikan data. Dalam konteks penelitian kualitatif, data dapat disampaikan dalam berbagai format seperti table, grafik, diagram alir, pictogram dan lain sebagainya. Dengan cara ini, data menjadi terstruktur dan tersusun dalam pola hubungan yang mempermudah pemahaman.

Penyajian data merupakan sebuah kegiatan dalam menyusun informasi, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan (Rijali, 2019). Di samping itu, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui ringkasan, diagram, hubungan antara kategori, diagram alir, dan sebagainya, namun format yang umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif, seperti dalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahap pengumpulan data, penelusuran data, interpretasi benda-benda, pencatatan pola yang teratur,

penjelasan dan mengikuti urutan sebab-akibat (Rijali, 2019). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merujuk pada penemuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Penemuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya belum terlukis dengan jelas, namun menjadi lebih terang setelah dilakukan penelitian.

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat penting untuk memastikan validitas dan realibilitas hasil yang diperoleh, sehingga data yang diperoleh dan diteliti dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data adalah dasar dari konsep validitas dan reliabilitas, seperti yang ditemukan dalam penelitian kuantitatif, yang kemudian disesuaikan dengan persyaratan, kriteria, dan paradigma pengetahuan yang diterapkan

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat diperiksa melalui teknik triangulasi, yaitu pendekatan yang menggabungkan berbagai metode, sumber data, atau perspektif untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, sehingga data yang diperoleh dan diteliti dapat dipertanggungjawabkan.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability. Dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data, dimana dilakukan menggunakan triangulasi (Sugiyono, 2022). Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, terdapat tipe triangulasi :

- a. Triangulasi sumber, Untuk menguji kredibilitas, data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diperiksa. Data tersebut kemudian dijelaskan dan dikelompokkan sesuai dengan informasi yang berasal dari sumber-sumber tersebut. Peneliti akan mengidentifikasi data yang memiliki kesamaan serta perbedaan, lalu menganalisisnya secara lebih mendalam.
- b. Triangulasi teknik, pengujian dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan metode berbeda, seperti wawancara atau analisis dokumen. Jika ada perbedaan hasil, peneliti akan mengonfirmasi kembali data tersebut kepada sumber untuk memastikan keakuratannya.
- c. Triangulasi waktu, melibatkan perbandingan informasi yang diberikan oleh narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dan pertemuan berikutnya, yang mungkin menunjukkan perbedaan. Untuk memastikan data yang lebih kredibel, penting untuk melakukan pengecekan secara berulang (Sugiyono, 2013)